

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin  
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 355-365  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: 2986-6340  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10137903>

## Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Lukas Pattipeilohy<sup>1</sup>, Yakobus Adi Saingo<sup>2\*</sup>

<sup>12</sup>Institut Agama Kristen Negeri Kupang

\*Email korespondesi: [y.a.s.visi2050@gmail.com](mailto:y.a.s.visi2050@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai Pancasila sebagai dasar sistem kesejahteraan masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk studi pustaka yang mendapatkan informasi pendukung dari berbagai referensi ilmiah dari Jurnal, prosiding, artikel ilmiah, buku akademik yang berkaitan dengan tema pembahasan. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif untuk memberi gambaran mengenai Pancasila sebagai sistem kesejahteraan yang menjadi dasar aktifitas keseluruhan Masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Pancasila sebagai sistem kesejahteraan mencerminkan prinsip-prinsip filosofis dan nilai-nilai dasar yang mendasari tatanan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Pancasila sebagai sistem kesejahteraan dapat dipandang sebagai: Pancasila sebagai Fondasi Filosofis, Keadilan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Demokrasi Politik dan Ekonomi, Perlindungan Sosial. Masyarakat Indonesia harus memahami bahwa Pancasila bukan hanya menjadi panduan bagi pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia dalam menciptakan masyarakat adil dan Makmur. Ini mencakup upaya untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar, menjaga keadilan ekonomi, memastikan demokrasi yang inklusif, dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, Pancasila berperan penting dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata kunci:** Pancasila, Sistem Kesejahteraan, Masyarakat Indonesia.

### Abstract

*The aim of this research is to discuss Pancasila as the basis of the welfare sistem of Indonesian society. The method used in this research is in the form of a literature study which obtains supporting information from various scientific references from journals, proceedings, scientific articles, academic books related to the theme of discussion. Data were analyzed using a descriptive approach to provide an overview of Pancasila as a welfare sistem which is the basis for the activities of all Indonesian society. The results of this research are that Pancasila as a welfare sistem reflects the philosophical principles and basic values that underlie Indonesia's social, political and economic order. Pancasila as a welfare sistem can be viewed as: Pancasila as a Philosophical Foundation, Social Justice, Social Welfare, Political and Economic Democracy, Social Protection. Indonesian people must understand that Pancasila is not only a guide for the government, but also a shared responsibility of all Indonesian people in creating a just and prosperous society. This includes efforts to provide basic needs services, maintain economic justice, ensure inclusive democracy, and protect human rights. Thus, Pancasila plays an important role in efforts to achieve prosperity and justice for all Indonesian people.*

**Keywords:** Pancasila, Welfare Sistem, Indonesian Society

---

#### Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 12 November 2023

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara majemuk yang memiliki asas ideologi dan sejarah berbeda dengan negara lainnya di dunia.(Santika, Sujana, & Winaya, 2019) Dengan kemajemukannya ini, para pendiri bangsa ini menetapkan Pancasila sebagai ideologi

negara yang diangkat dari nilai asli kepribadian bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, ras dan bahasa. Tujuan Pembangunan bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 yakni “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” merupakan cita-cita bangsa demi menciptakan sebuah sistem kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana termuat dalam pasal 27 yakni “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” dan pasal 33 dan 34 Bab XIV yang diamandemen tahun 2002 yaitu “perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Sebagai sebuah Ideologi negara yang terinspirasi dari pemikiran para pendiri bangsa, yang rumusannya tentang tujuan bangsa, dalam kenyataannya bangsa Indonesia belum bisa meraih cita-citanya. Apalagi yang berhubungan dengan kesejahteraan bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam membentuk masyarakat adil dan makmur. Pancasila bukan hanya sekadar ideologi atau falsafah, tetapi juga merupakan landasan berpijak yang mendasari upaya mencapai sistem kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dalam konteks sistem kesejahteraan, sebagai dasar negara Indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, menjadi dasar atau prinsip-prinsip yang mengatur tatanan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Pancasila bukan hanya sekadar seperangkat nilai, melainkan juga menjadi landasan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat (Handayani & Dewi, 2021). Sementara sebagai sistem kesejahteraan atau negara kesejahteraan, adalah suatu sistem di mana negara memiliki peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Dalam konteks Pancasila sebagai suatu sistem ini mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan dasar, perlindungan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi politik. Oleh karenanya, Pancasila dan sistem kesejahteraan tidak dapat dipisahkan, karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung sistem kesejahteraan. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi. Nilai-nilai ini membentuk dasar yang kuat dalam mencapai tujuan bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur.

Lima sila dalam Pancasila merupakan prinsip dasar Negara, dapat juga dipandang sebagai dasar sistem kesejahteraan dalam arti bahwa setiap sila memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat (Safitri & Dewi, 2021). Bagaimana Pancasila dapat diartikan sebagai sistem kesejahteraan, dapat dipandang sebagai berikut; Ketuhanan yang maha esa, merupakan sila pertama yang menekankan pentingnya mengakui dan menghormati Tuhan yang maha esa. Dalam konteks kesejahteraan, nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari keyakinan terhadap tuhan dapat menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera, Kemanusiaan yang adil dan beradab; sila kedua menekankan perlunya menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, kesejahteraan diartikan sebagai hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara penuh. Persatuan Indonesia; sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dalam sistem kesejahteraan, persatuan dapat diartikan sebagai kerjasama dan saling dukung antar anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, termasuk pencapaian kesejahteraan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; sila keempat menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem kesejahteraan, hal ini dapat diartikan perlunya melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan mereka, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sila kelima,

menegaskan perlunya mewujudkan rasa keadilan sosial. Dalam konteks kesejahteraan, hal ini dapat diartikan sebagai perlunya mendistribusikan sumber daya dan peluang secara adil sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.

Pancasila dalam implementasinya sebagai dasar Negara memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Setiap silanya memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep ini menekankan bahwa kesejahteraan bukan hanya tentang kemakmuran materi, tetapi juga mencakup aspek-aspek spiritual, moral dan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses ke semua aspek pelayanan, misalnya pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan yang layak, dan perlindungan sosial. Pemerintah juga berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui berbagai program redistribusi dan perlindungan hak-hak pekerja (Sari & Najicha, 2022).

Pancasila juga menekankan peran demokrasi politik, yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi. Ini memberikan warga negara kontrol yang lebih besar terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, Pancasila dapat dianggap sebagai suatu sistem kesejahteraan yang memandu pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai tujuan kesejahteraan dan menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari cita-cita negara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk studi pustaka untuk membahas mengenai Pancasila sebagai dasar sistem kesejahteraan masyarakat Indonesia. Metode studi pustaka adalah merupakan penelitian yang mendapatkan informasi pendukung dari berbagai referensi ilmiah dari Jurnal, prosiding, artikel ilmiah, buku akademik yang berkaitan dengan tema pembahasan (Arham, Firmansyah, & Nor, 2020). Data dikumpulkan dengan mencari informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik pembahasan sehingga dapat membentuk struktur penulisan yang mampu menyeberangkan pesan bersifat informatif bagi para pembaca. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif untuk memberi gambaran mengenai Pancasila sebagai sistem kesejahteraan yang menjadi dasar aktifitas keseluruhan Masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang penulis upayakan untuk memusatkan perhatian pada masalah yang diteliti dan berupaya mendeskripsikannya dengan membandingkannya dengan penelitian atau penulisan yang sudah ada sebelumnya, selain itu data diinterpretasikan secara rasional dengan fakta-fakta yang ada saat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakikat Pancasila sebagai suatu Sistem**

Pancasila sebagai suatu sistem terdiri atas lima sila yang makna dalam konteksnya adalah suatu kesatuan yang membentuk sistem kesejahteraan yang utuh karena terdiri dari berbagai elemen atau prinsip yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Sabina, Dewi, & Furnamasari, 2021). Sistem memiliki beberapa ciri-ciri yang umumnya berlaku, dan ini juga berlaku untuk Pancasila:

1. Suatu kesatuan bagian: Pancasila adalah suatu kesatuan yang terdiri dari lima sila. Setiap sila merupakan bagian integral dari sistem ini.
2. Fungsi sendiri-sendiri: Setiap sila dalam Pancasila memiliki fungsi dan prinsipnya sendiri. Masing-masing sila mengandung nilai-nilai yang mewakili aspek-aspek penting dalam kehidupan dan tatanan sosial.
3. Saling berhubungan dan ketergantungan: Kelima sila dalam Pancasila saling berhubungan dan saling ketergantungan. Mereka tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi

membentuk kerangka kerja yang bersama-sama menciptakan dasar nilai dan prinsip yang melandasi negara dan masyarakat Indonesia.

4. Tujuan bersama (Tujuan Sistem): Tujuan Pancasila adalah mencapai kehidupan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kelima sila bekerja sama untuk mencapai tujuan ini, dan tujuan tersebut mencakup keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Lingkungan yang kompleks: Pancasila berlaku dalam lingkungan yang kompleks, yang mencakup berbagai faktor budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Sistem ini harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada dalam masyarakat.

Dalam konteks negara Indonesia, Pancasila bukan hanya sekadar sebuah sistem, tetapi juga merupakan dasar negara yang dijadikan landasan untuk pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Pancasila mengatur nilai-nilai yang membimbing tindakan pemerintah dan warga negara dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan persatuan bangsa.

Pengimplementasian Pancasila sebagai sistem kesejahteraan mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kebijakan, program, dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum (Nurhikmah, Nugrahaningtyas, & Pamungkas, 2021). Tujuan ini sering tercermin dalam program pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat.

### **Pancasila sebagai landasan moral**

Pancasila memberikan landasan moral bagi pemerintah untuk berperan dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka Pancasila, perlindungan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang adil, Makmur dan bermartabat. Dengan demikian Pancasila memainkan peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial di Indonesia (Susilawati, 2021).

Pancasila juga memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi adalah prinsip yang menekankan pada distribusi yang adil dari kekayaan dan kesempatan ekonomi dalam masyarakat. Pancasila memberikan landasan moral dan filosofis untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan inklusif di Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memastikan akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan melindungi hak-hak ekonomis warga Negara. Dengan demikian, Pancasila benar-benar menjadi rujukan sumber yang memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai suatu sistem dalam konteksnya mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan dasar, perlindungan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi politik. Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila menjadi sebuah sistem yang memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara. Pemenuhan hak pelayanan dasar adalah salah satu aspek kunci dalam menciptakan Masyarakat yang adil, makmur dan Sejahtera sesuai prinsip-prinsip Pancasila (Anshori, 2021). Dalam prakteknya, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan dasar seperti pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau kepada semua warga negara. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan dan fasilitas

Kesehatan, peningkatan akses, serta menciptakan program-program perlindungan sosial guna mendukung masyarakat yang rentan.

Pancasila dapat diartikan sebagai dasar filosofis yang mendasari prinsip-prinsip negara dan pemerintah Indonesia yang mencakup sistem perlindungan sosial. Pancasila memberikan dasar moral dan nilai-nilai yang mendukung perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem perlindungan sosial di Indonesia mencakup program-program seperti jaminan Kesehatan, program bantuan sosial dan jaminan pension. Pemerintah Indonesia berusaha untuk menyediakan perlindungan sosial yang luas dan efektif guna melindungi warga negara dari berbagai resiko social, seperti penyakit, kehilangan pekerjaan dan kemiskinan.

Pancasila juga dapat dipandang sebagai sebuah sistem demokrasi politik atau sistem pemerintahan, dimana Pancasila memberikan arahan dan bimbingan sistem politik menuju demokrasi inklusif dan berkeadilan (Wandani & Dewi, 2021). Pancasila mendorong penghormatan terhadap hak-hak rakyat, keadilan social dalam proses politik dan upaya untuk menciptakan lingkungan politik yang mendukung kesejahteraan rakyat. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan landasan filosofis dan moral untuk pelaksanaan demokrasi politik di Indonesia. Meskipun Pancasila lebih sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar negara dan pemerintahan, ia juga memiliki relevansi dalam konteks kesejahteraan sosial.

Hutabarat et al., (2022) menjelaskan, Pancasila sebagai landasan moral dan sistem kesejahteraan mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Prinsip-prinsip Pancasila yang relevan dalam konteks ini adalah:

1. Ketuhanan yang Maha Esa: Prinsip pertama Pancasila mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber nilai dan moral dalam kehidupan. Ini dapat diartikan sebagai dasar moral yang mengarah pada perbuatan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: menekankan pada pentingnya menghormati harkat, martabat dan hak asasi manusia. Prinsip ini berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup dalam sistem kesejahteraan.
3. Persatuan Indonesia: Prinsip persatuan menekankan pentingnya menciptakan kesatuan dan solidaritas di antara beragam kelompok sosial, agama, dan budaya di Indonesia. Hal ini dapat berkontribusi pada stabilitas dan harmoni sosial yang mendukung kesejahteraan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: Prinsip demokrasi politik dalam Pancasila berarti masing-masing penduduk mempunyai hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Demokrasi yang sehat dan inklusif dapat mendukung distribusi yang lebih adil dari sumber daya dan manfaat sosial.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Prinsip ini berfokus pada upaya menciptakan pemerataan sumber daya dan kesempatan bagi semua warga negara. Ini mencakup akses yang adil terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam praktiknya, Pancasila sebagai dasar landasan moral dan sistem kesejahteraan mendorong pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam menyediakan pelayanan dasar, perlindungan social, keadilan ekonomi dan demokrasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini diwujudkan dalam berbagai program pembangunan, kebijakan publik, dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup warga negara.

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi Pancasila sebagai sistem kesejahteraan dapat menjadi tantangan yang kompleks, mengingat kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Selain itu, definisi dan prioritas kesejahteraan dapat berbeda-beda di antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan individu. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan kerja keras, koordinasi, dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.

### **Pancasila sebagai Suatu Sistem Kesejahteraan**

Pancasila sebagai sistem kesejahteraan merujuk pada konsep bahwa Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memberikan kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang mengarah pada upaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya sebagai dasar ideologis dan politik, tetapi juga sebagai landasan moral dan sosial untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi Masyarakat. Pengertian ini mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*; diantara adalah landasan moral dan etika: pancasila mencakup prinsip-prinsip moral, seperti menghormati hak asasi manusia, keadilan, persatuan, dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip ini menjadi panduan etika dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. *Kedua*: Dasar Pemerintahan yang berkeadilan: Pancasila menekankan pentingnya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Hal ini berarti bahwa sistem pemerintahan Indonesia harus memastikan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan dan mendorong pemerataan kekuasaan. *Ketiga*: Pembangunan Sosial dan Ekonomi: Pancasila mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Prinsip keadilan sosial mengharuskan pemerintah untuk berkomitmen pada distribusi yang lebih adil dari sumber daya dan manfaat sosial. *Keempat*: Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia: Prinsip-prinsip Pancasila mendukung kesetaraan hak dan peluang bagi semua warga negara Indonesia. Hal ini mencakup hak atas pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan lingkungan hidup yang sehat. *Kelima*: Harmoni Sosial: Prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila menekankan pentingnya menciptakan harmoni sosial di antara beragam kelompok sosial, agama, dan budaya. Harmoni ini merupakan prasyarat untuk kesejahteraan dan perkembangan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, sebagai sistem kesejahteraan, Pancasila harus dipandang sebagai dasar negara kesejahteraan (welfare state) yang tidak hanya mengorganisasikan kesejahteraan sosial (social welfare) dan pelayanan sosial (social service), tetapi juga menempatkan dan menekankan setiap orang untuk memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya (Rizqulla & Najicha, 2022). Bentuk pelayanan social apa yang dapat diterima seseorang dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai negara kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Keadilan sosial: Salah satu poin penting dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks negara kesejahteraan, prinsip ini penting karena mencakup distribusi yang lebih adil dari kekayaan dan peluang.
2. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi: Pancasila menekankan demokrasi sebagai salah satu nilai inti, dan hal ini juga relevan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Demokrasi politik memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi. Demokrasi ekonomi, di sisi lain, menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembagian hasil ekonomi secara adil.

3. Sistem ekonomi yang berbeda; Pancasila memiliki pandangan ekonomi yang berbeda dari kapitalisme dan sosialisme. Meskipun pasar dihormati, Pancasila juga menekankan keadilan sosial dan etika dalam ekonomi. Ini mencerminkan komitmen untuk menghindari eksploitasi dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
4. Kesatuan bangsa: Pancasila adalah ideologi yang berfungsi sebagai dasar bersama bagi semua warga negara Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, bangsa Indonesia bertujuan untuk memperkuat kesatuan dan mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ini membantu menghindari perpecahan dan konflik internal, yang penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara kesejahteraan dapat menjadi alat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keadilan sosial, demokrasi, dan etika dalam ekonomi. Dengan cara ini, Pancasila dapat menjadi pedoman yang kuat dalam upaya mencapai tujuan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Pancasila menjadi sebuah sistem kesejahteraan yang memainkan peran penting dalam beberapa aspek: *Pertama: Pemenuhan kebutuhan dasar.* Bagaimana nilai-nilai Pancasila memberikan landasan spiritual untuk memotivasi pelayanan dan pengabdian kepada sesama dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara serta menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan adil dan beradab, termasuk pemenuhan hak dasarnya. *Kedua: Perlindungan sosial.* dimana nilai-nilai Pancasila mendorong perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial, termasuk upaya perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menyuarakan pentingnya rasa keadilan sosial, yang mencakup perlindungan sosial agar seluruh rakyat dapat merasakan manfaat pembangunan. *Ketiga: Keadilan ekonomi.* Pancasila mengingatkan pada keadilan dalam aspek ekonomi, termasuk distribusi sumber daya yang adil dan merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta menunjukkan tekad untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan yang setara untuk semua warga negara. *Keempat: Demokrasi politik.* Pancasila menunjukkan tekad untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang terwakilkan atau dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Pandangan tersebut di atas mencerminkan upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik nyata pembangunan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak, keadilan, dan demokrasi. Penting untuk terus mengkaji dan mengevaluasi implementasi nilai-nilai ini agar pembangunan dapat sesuai dengan semangat dan tujuan yang diusung oleh Pancasila sebagai dasar Negara (Aminullah, 2023). Pemenuhan kebutuhan dasar warga negara merupakan aspek pertama sebagai implementasi sila-sila Pancasila dapat dikaji sebagai berikut: Ketuhanan yang maha esa merupakan landasaan moral dan etika, dimana memotivasi pelayanan dan pengabdian kepada sesama sebagai manifestasi dari penghormatan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari keyakinan keagamaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan hak asasi manusia yang menegaskan keadilan dan martabat manusia sebagai nilai dasar, mendorong perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Persatuan Indonesia; kesejahteraan bersama, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman untuk mencapai kesejahteraan bersama tanpa memandang perbedaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; partisipasi rakyat, menegaskan demokrasi sebagai sarana partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan dan Pembangunan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; pembagian sumber daya

yang adil, menunjukkan tekad untuk menciptakan keadilan sosial, termasuk distribusi yang adil dari sumber daya dan manfaat pembangunan.

Implementasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan pendidikan yang inklusif; memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang atau status sosial-ekonomi, Pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan untuk membentuk karakter yang beradab. Menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau serta program pencegahan dan promosi kesehatan. pemberdayaan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil serta pemeliharaan alam dan lingkungan serta kesekarasan alam dan lingkungan.

Aspek kedua, Pandangan Pancasila sebagai usaha perlindungan sosial bagi warga negara mencerminkan tekad untuk melindungi hak-hak dasar dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar Pancasila dapat diartikan dan diimplementasikan sebagai fondasi untuk kebijakan perlindungan sosial. Aspek pandangan Pancasila dalam konteks perlindungan sosial, yaitu Sila pertama; Ketuhanan yang maha esa; Mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai nilai yang tak terpisahkan dari pandangan hidup berdasarkan Pancasila, mendorong perlindungan sosial sebagai tindakan moral dan etika yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Sila kedua; Kemanusiaan yang adil dan beradab: Memastikan perlindungan terhadap martabat setiap individu tanpa diskriminasi, dan menekankan perlunya perlindungan sosial untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Sila ketiga; Persatuan Indonesia; Mendorong terciptanya solidaritas sosial diantara masyarakat Indonesia melalui program perlindungan sosial, dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali mendapatkan manfaat dari upaya perlindungan sosial. Sila keempat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi program perlindungan sosial dan menuntut agar pemerintah dalam konteks perlindungan sosial bersifat transparan dan adil, serta Sila kelima; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Memastikan distribusi manfaat perlindungan sosial secara adil untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, dan menekankan pada program perlindungan sosial yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

Implementasi dalam program perlindungan sosial, meliputi asuransi kesehatan dan jaminan sosial, program-program bantuan yang tepat sasaran untuk membantu kelompok rentan, mewujudkan pendidikan inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat, memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan dukungan usaha mikro dan kecil serta menyusun kebijakan yang melindungi lingkungan dan sumber daya alam sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi mendatang (Siahaan, Agustina, Jonandes, & Fitriano, 2022). Sementara pandangan Pancasila sebagai upaya melaksanakan keadilan ekonomi bagi warga negara sebagai aspek ketiga, menekankan pada prinsip-prinsip dasar Pancasila yang mendukung distribusi yang adil dari sumber daya dan manfaat ekonomi. meliputi aspek-aspek: Sila pertama Ketuhanan yang esa; mengakui prinsip keadilan sosial sebagai bagian integral dari pandangan hidup berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sila kedua; Kemanusiaan yang adil beradab; Memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan memiliki hak yang sama dalam aspek ekonomi. Sila ketiga Persatuan Indonesia; Mendorong solidaritas untuk mencapai keadilan ekonomi, dimana setiap anggota masyarakat mendukung satu sama lain. Sila keempat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Menjamin adanya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan melalui mekanisme demokratis serta sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Menekankan pada perlunya distribusi kekayaan yang merata untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi.

Implementasi nilai Pancasila di tengah kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya keadilan ekonomi meliputi mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan kepada sektor ekonomi rakyat, seperti usaha mikro dan menengah, menyusun kebijakan yang mendukung redistribusi kekayaan, termasuk pajak dan program bantuan sosial yang adil, meningkatkan akses dan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penduduk di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses, menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi masyarakat serta menjamin hak-hak buruh dan pekerja termasuk upah yang adil dan kondisi kerja yang aman (Daeli & Asbari, 2022).

Pandangan Pancasila sebagai upaya melaksanakan demokrasi politik bagi warga negara sebagai aspek keempat, mencerminkan komitmen untuk memberikan ruang partisipasi aktif dan merata kepada seluruh rakyat dalam pengembalinya keputusan politik. Prinsip-prinsip dasar Pancasila dapat diartikan dan diimplementasikan sebagai fondasi untuk membangun sistem demokrasi politik yang inklusif dan adil, yang tergambar dalam aspek-aspek kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; bagaimana negara menjamin partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui mekanisme perwakilan maupun permusyawaratan. Aspek persatuan Indonesia; yang mendorong inklusivitas dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia dalam konteks demokrasi serta aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dimana menerapkan prinsip demokrasi sosial yang mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat.

Implementasinya dalam upaya demokrasi politik meliputi menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala dan adil untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik, menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai bagian integral dari proses demokrasi, melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan melalui konsultasi publik, forum diskusi dan mekanisme partisipasi lainnya serta menjamin perlindungan hak-hak politik setiap individu, termasuk hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi.

Pancasila dalam penerapannya, melalui hal-hal yang sederhana dan dapat dirasakan melalui nilai-nilai kemasyarakatan, sosial dan budaya, misalnya sikap saling menghargai, menghormati, gotong royong yang menjadi akar dasar rumusan Pancasila (Surajiyo, 2022). Memperlakukan sesama makhluk tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan, sikap hidup saling tolong menolong, kekeluargaan dan gotong royong serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dalam berbagai bidang politik, ekonomi dan sosial menjadi ciri khas Pancasila tersebut.

Konsep negara kesejahteraan memang menekankan peran negara dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses Masyarakat kepada layanan dasar seperti Pendidikan, pelayanan Kesehatan, perumahan yang layak dan pelayanan social lainnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar ini. Negara kesejahteraan berusaha untuk menciptakan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat. Ini dapat mencakup pajak yang progresif dan program redistribusi yang mengurangi kesenjangan ekonomi.

Negara kesejahteraan menyediakan perlindungan sosial bagi warga yang memerlukannya, seperti jaminan sosial, bantuan sosial, dan program-program yang membantu masyarakat yang rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Pemerintah, yang dipimpin oleh Presiden dalam konteks Indonesia, memiliki peran utama dalam menjalankan program-program kesejahteraan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan memastikan adanya keadilan sosial dan ekonomi di negara tersebut, dan pemerintah

memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan dana, fasilitas, dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah sebagai alat negara sesuai konstitusi negara memiliki kewenangan dan fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan sosial sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD Negara kesatuan Republik Indonesia 1945 (Idham, Sudewi, & Nadriana, 2022). Pemerintah harus berkomitmen dan terus berupaya untuk memberikan akses pelayanan kebutuhan dasar, perlindungan, sosial, keadilan ekonomi dan demokrasi politik kepada warga negaranya tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan budaya. Upaya tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah sebagai prioritas utama dengan mengedepankan nilai-nilai universal Pancasila, seperti kesetaraan sosial, keadilan sosial dan pemerataan ekonomi serta kesamaan hak kedudukan di dalam demokrasi politik yang menjadi roh pembangunan kesejahteraan. Pemerintah harus bertumpuh pada model pelayanan negara kesejahteraan (welfare state) yang mengedepankan pemberdayaan dan perlindungan sosial. secara konstitusional sebagaimana yang terkandung nilai-nilai luhur Pancasila.

## KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar sistem kesejahteraan masyarakat Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip filosofis dan nilai-nilai dasar yang mendasari tatanan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Pancasila sebagai sistem kesejahteraan dapat dipandang sebagai :

1. Pancasila sebagai Fondasi Filosofis: Pancasila adalah dasar filosofis yang memberikan panduan moral dan etika dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
2. Keadilan Sosial: Pancasila menekankan pentingnya persamaan dan pemerataan bagi seluruh secara adil bagi rakyat Indonesia. Prinsip ini mencakup distribusi yang adil dari kekayaan, akses yang sama terhadap pelayanan dasar, dan perlindungan hak-hak rakyat.
3. Kesejahteraan Sosial: Sila "Kesejahteraan Sosial" dalam Pancasila mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.
4. Demokrasi Politik dan Ekonomi: Pancasila mengedepankan demokrasi politik yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik, dan demokrasi ekonomi yang memastikan kesejahteraan ekonomi rakyat.
5. Perlindungan Sosial: Pancasila memberikan landasan moral untuk sistem perlindungan sosial yang melindungi rakyat dari risiko sosial dan ekonomi, seperti penyakit, kehilangan pekerjaan, dan kemiskinan.

Pancasila sebagai dasar sistem kesejahteraan masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi panduan bagi pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia dalam menciptakan masyarakat kehidupan bermasyarakat yang adil dan Makmur. Nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan haruslah pengimplemantasiannya dapat mencakup upaya untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar, menjaga keadilan ekonomi, memastikan demokrasi yang inklusif, dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, Pancasila berperan penting dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Referensi

- Aminullah. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2), 408–423.
- Anshori, R. R. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara Menurut KH. M. Hasyim Asy'ari.

- Jurnal PKN Progresif*, 16(1), 27–32.
- Arham, A., Firmansyah, A., & Nor, A. M. E. (2020). Penelitian Transfer Pricing di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 57–72.
- Daeli, S. I., & Asbari, M. (2022). Bahaya Pancasila Menjadi Trisila dan Ekasila: Telaah Singkat Pemikiran Refly Harun. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(1), 37–41.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6–12.
- Hutabarat, D. T. H., Sutta, R. R. A., Wardana, W. H., Fadila, Z. N., Sapahira, P., & Tanjung, R. (2022). Memahami Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Ideologi & Dasar Negara. *JHSSB: Journal Of Humanities, Social Sciences And Business*, 1(2), 19–25.
- Idham, Sudewi, & Nadriana, L. (2022). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat. *JAMS: Jurnal Abdi Masyarakat Saburai*, 3(2), 96–103.
- Nurhikmah, A. R., Nugrahaningtyas, N., & Pamungkas, A. (2021). Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa. *Jurnal Pancasila*, 2(2), 59–69.
- Rizqulla, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pengimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630–2633.
- Sabina, D., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9103–9106.
- Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 88–94.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED: Jurnal Etika Demokrasi*, 4(2), 89–98.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Harmony*, 7(1), 53–58.
- Siahaan, J., Agustina, R., Jonandes, R., & Fitriyono, R. (2022). Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(3), 26–37.
- Surajiyo. (2022). Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. *Jurnal Ikraith Humaniora*, 6(1), 54–65.
- Susilawati. (2021). Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional. *Jurnal Prajaiswara*, 2(1), 215–224.
- Wandani, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 34–39.